

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemberian insentif Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Sleman sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan Bupati yang berlaku, dimana dalam pelaksanaannya perangkat desa di Kabupaten Sleman yang tepat waktu dalam melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Daerah melalui instansi Badan Keuangan dan Aset Daerah, seperti paket wisata yang diberikan kepada Kepala Dusun. Selain itu pada daerah-daerah yang memiliki Pajak Bumi dan Bangunan dengan nilai pemungutan pajak kecil biasanya dibayar terlebih dahulu oleh Kepala Desa agar pembayaran pajak dapat tepat waktu sehingga Kepala Desa mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Daerah.
2. Kendala dalam memenuhi target penerimaan PBB sehingga diperoleh insentif pajak di Kabupaten Sleman adalah Kesulitan Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam mendata kepemilikan tanah masyarakat dikarenakan terdapat wajib pajak yang memiliki tanah-tanah yang sudah dialihkan kepemilikannya, namun wajib pajak tersebut tidak melaporkan terhadap pihak aparat.

Upaya yang dilakukan oleh Badan Keuangan dan Aset daerah adalah menggunakan metode jemput bola dengan memberikan fasilitas kepada masyarakat supaya membayar secara langsung pada saat pekan pembayaran, dan melakukan pendekatan kepada masyarakat secara persuasive dengan tujuan menyadarkan masyarakat supaya dapat melakukan pembayaran tepat waktu dengan harapan dapat menjadi panutan dan memberi pengaruh terhadap masyarakat yang lain.

B. Saran

1. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman perlu melakukan sosialisasi terkait aturan PBB dan Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan kepada masyarakat di Kabupaten Sleman agar masyarakat memahami aturan dengan tujuan masyarakat membayar pajak tepat waktu dan tidak ada tunggakan pajak.
3. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman perlu melakukan reformasi dibidang perpajakan, antara lain: Melakukan penyempurnaan regulasi/perangkat aturan, menggalakkan sosialisasi agar menambah pengetahuan untuk menumbuhkan kesadaran wajib pajak taat pajak, melakukan evaluasi, menyediakan database yang lengkap, akurat, terintegrasi dan terjamin kerahasiannya, meningkatkan penegakan hukum dalam pengawasan dan pemberian sanksi secara konsisten dan tegas, dan melakukan pemungutan pajak yang adil berdasarkan undang-undang, tidak mengganggu perekonomian, efisien dan sistemnya harus sederhana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Kol.Kal. Susijo Martoyo, SE., 1992, Manajemen Sumber Daya Manusia, BPFE, ed ke- 3, Yogyakarta
- Moh. Kasiram, 2010, Metodologi Penelitian (Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian), UIN Maliki, Malang, Cet. Ke -2
- Mukti Fajar Nur Dewata, Yulianto Achmad, MH, 2017, Dualism Penelitian Hukum Normatif & Empiris, UH, Yogyakarta.
- Marcel Mauss, Parsudi Suparlan, 1992, Pemberian: bentuk dan fungsi pertukaran di masyarakat kuno / Marcel Mauss; pengantar dan penerjemah, Parsudi Suparlan, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta.
- Phaureula Artha Wulandari dan Emy Iryanie, 2018, Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah, Deepublish, Yogyakarta.
- Rochmat Soemitro, 1998, Asas dan Dasar Perpajakan Buku I, Refika aditama, Makassar Daerah (Studi Kasus Di Kabupaten Bogor)," Law Reform, vol. 4
- Rona Rositawati, 2009, Sistem Pemungutan Pajak Daerah Dalam Era Otonomi
- T. Hani Handoko, 1987, Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia, BPFE, ed ke- 2, Yogyakarta
- Y. Sri Pudyatmoko, 2001, Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Penetapan Batas Akhir Pembayaran Utang Pajak, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta

Internet :

- Aida Holandari, 2020, Kenali 3 Jenis Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia, <https://www.pajakku.com/read/608291caeb01ba1922ccaa24/Kenali-3-Jenis-Sistem-Pemungutan-Pajak-di-Indonesia>
- Agus Firmansyah Sobri, Pengaruh Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2014-2016,

[http://repository.uinbanten.ac.id/2127/1/AGUS%20FIRMANSYAH%20S
OBRI%20131401377.pdf](http://repository.uinbanten.ac.id/2127/1/AGUS%20FIRMANSYAH%20S
OBRI%20131401377.pdf)

Ardiyanto, Analisis Sistem Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap
Optimalisasi Pencapaian Target Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sinjai,
[https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/2288-Full Text.pdf](https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/2288-Full%20Text.pdf)

Erwin Agustiawan, Efektivitas Pengelolaan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kota
Makassar, [http://repositori.uinalauddin.ac.id/13016/1/A.%20ERWIN%20A
GUSTIAWAN.pdf](http://repositori.uinalauddin.ac.id/13016/1/A.%20ERWIN%20A
GUSTIAWAN.pdf)

Hari Sriyanto, 2021, Kewajiban Warga Negara Membayar Pajak
[https://binus.ac.id/character-building/2021/03/kewajiban-warga-negara-
membayar-pajak](https://binus.ac.id/character-building/2021/03/kewajiban-warga-negara-
membayar-pajak)

Martha Sri Renaningsih, 2015, Pelaksanaan Pengalihan Pajak Bumi Dan Bangunan
(PBB) Di Kota Surabaya, [http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-
kmp70015955aafull.pdf](http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-
kmp70015955aafull.pdf)

Rina Adelina, 2020, Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi
Dan Bangunan (PBB) Terhadap Pendapatan Daerah Di Kabupaten Gresik,
<https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnalakuntansi/article/view/752/536>

Sandra, 2020, Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, <https://www.pajakku.com>

Sandra, 2021, Mengenal Fungsi Pajak di Indonesia, <https://www.pajakku.com>

Jurnal :

Saifulloh Puspa Yuda, Wilopo, Muhammad Iqbal, 2021, Analisis Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Pedesaan dan perkotaan setelah menjadi pajak daerah

Siti Nurhayati, 2012, Metodologi Penelitian Praktis Edisi 2, Fakultas Ekonomi Univ, Pekalongan.

Peraturan Perundang – undangan :

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan

Peraturan Bupati Sleman Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

